



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus Berbasis Wisata Halal

Eka Feriyanto

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Kalbar-Indonesia

Jln. Sejangkung Desa Sebayon Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas

Korespondensi penulis: ekaferiyanto21@gmail.com

ABSTRACT. *This research aims to find out the role of the government in developing the economy of the Bukit Piantus tourist area based on halal tourism. This type of research uses a qualitative approach by producing descriptive data. Research data was collected using the interview method of 5 informants. Data analysis includes data collection, data reduction, data classification, data display, conclusions and verification. The results of research regarding the Role of the Sambas Regency Regional Government in the Economic Development of the Piantus Hill Tourism Area show that the Government's role as a Motivator is by providing synergy between the Government and the Community and the Private Sector, while the Government's Role as a Facilitator is by providing skills development assistance to the people of Piantus Village and the Regency Government is carrying out procurement and development of facilities at Piantus Hill Tourism, the role of the Government as a dynamist in synergy with the community and the private sector in developing Piantus Hill Tourism so that it can develop the economy of the community in the Piantus Hill area, supporting factors in the economic development of the Piantus Hill Tourism area are the participation of the Piantus Village community and having The potential of this tourist attraction can be an attraction for tourists, but inhibiting factors such as limited budget for facilities and infrastructure costs and land problems in the Bukit Piantus tourist area can slow down the development of Bukit Piantus tourism.*

Keywords: Government Role, Piantus Hill, Halal Tourism.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus Berbasis Wisata Halal. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, Data penelitian dikumpul dengan menggunakan metode wawancara 5 Informan. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, Display data, Kesimpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus bahwa Peran Pemerintah selaku Motivator yaitu dengan adanya sinergitas Pemerintah dengan Masyarakat dan Pihak Swasta, sedangkan Peran Pemerintah selaku Fasilitator adalah dengan adanya pendampingan pengembangan keterampilan kepada masyarakat Desa Piantus dan Pemerintah Kabupaten melakukan pengadaan dan pengembangan fasilitas di Wisata Bukit Piantus, Peran Pemerintah sebagai dinamisor bersinergi bersama masyarakat dan swasta dalam mengembangkan Wisata Bukit Piantus sehingga dapat mengembangkan Ekonomi masyarakat di kawasan Bukit Piantus, faktor pendukung dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus adanya peran serta masyarakat Desa Piantus dan memiliki potensi Objek Wisata sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan, namun faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan parasarana serta masalah lahan di kawasan Wisata Bukit Piantus maka dapat memperlambat pengembangan Wisata Bukit Piantus.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Bukit Piantus, Wisata Halal.

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi bagian dari industri, yaitu salah satu industri yang dimana mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat menyediakan lapangan pekerjaan,

Received Desember 30, 2023; Revised Januari 31, 2024; Februari 15, 2024

** Eka Feriyanto, ekaferiyanto21@gmail.com*

peningkatan penghasilan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.¹ Pariwisata pada dasarnya merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.² Terkait dalam hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.³

Salah satu dari upaya mengurangi dampak negatif industri pariwisata yaitu dengan cara membangun destinasi-destinasi baru yang berpotensi menjadi daya tarik wisata tentu tujuan utamanya adalah mengembangkan ekonomi masyarakat serta melestarikan sumberdaya alam dan budaya untuk generasi yang akan datang (*sustainable tourism*), pengembangan Destinasi Wisata ini bisa dimulai dengan mengembangkan pariwisata daerah dari unit terkecil yaitu wilayah desa atau pedesaan, hal ini dikarenakan desa merupakan tempat sebagian besar atraksi wisata berada.⁴

Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata. Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, menunjukkan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Hal ini dapat lebih jelas bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya.⁵

Berbagai model pengembangan pariwisata diperkenalkan di seluruh dunia dengan mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ialah konsep pariwisata halal. Sebagaimana perkembangan-perkembangan konsep dalam sektor pariwisata ini tidak hanya karena faktor perkembangan iptek saja, beberapa faktor juga turut menjadi penyebab perkembangan dalam sektor ini contohnya, karena disebabkan faktor psikologis manusia, di mana manusia berkecenderungan menyukai sesuatu yang bernuansa baru sehingga segala yang bersifat sudah lama mulai kurang di lirik atau kurang diminati sehingga bagi mereka tidak menarik lagi.⁶

Wisata halal dengan wisata pada umumnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata ialah sebuah kegiatan perjalanan dalam jangka waktu sementara yang dilakukan seseorang atau lebih dengan mendatangi tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk rekreasi, menambah pengetahuan dan mempelajari keunikan-keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi.⁷ Hal ini jika dikaitkan dengan

¹ Januardi Deki, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang"; GOVERNANCE: Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Vol 8, No. 4, (2019), hlm 2.

² Muljadi, andri warman, "*Kepariwisata dan perjalanan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014) hlm 8.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990.

⁴ Manafie, Adi Hendrik, "Wisatawan dan Penerimaan Masyarakat Lokal Nemberala", (Salatiga: Tesis Master Program Pascasarjana UKSW Salatiga, 2003), hlm 21.

⁵ Januardi Deki, *Peran...* hlm 2.

⁶ Muhamad Djakfar, "*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal Indonesia*", (Malang : UIN Maliki Press, 2017), hlm 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Lembar republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

kata syariah atau halal, maka yang dimaksud dengan pariwisata syariah atau halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Wisata halal tergolong baru dalam dunia pariwisata. Beberapa sebutan lain dari pariwisata halal adalah *halal lifestyle*, *halal friend tourism*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destination* atau pariwisata syariah. Wisata halal memiliki jangkauan yang lebih luas dari wisata religi, wisata religi ialah wisata yang dilaksanakan dengan tujuan ibadah atau agama, seperti haji dan umrah ke mekkah, atau umumnya umat islam melakukan kunjungan atau berziarah ke makam para tokoh agama, wali atau ulama. Dalam konsep yang lebih umum, dimana pariwisata yang dilakukan tidak berseberangan dengan hukum Islam.⁹

Wisata Halal merupakan sebuah industri ditujukan kepada wisatawan muslim, Wisata halal merupakan suatu program yang dijalankan oleh Pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan wisata. Wisata halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wisata dapat mengembangkan pelayanan tambahan yang ditujukan untuk wisatawan yang beragama islam dalam melakukan kegiatan wisata namun tetap dapat menjalankan kewajiban yang seharusnya.

Pengembangan wisata halal bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan muslim, non muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, dan hotel yang menyediakan makanan yang halal dan tempat sholat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti pariwisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Sementara konsep syariah sendiri telah dibekukan lewat fatwa dan persetujuan MUI, kearifan lokal memberikan cita rasa unik yang melekat pada daerah tujuan wisata. Keterlekatan dengan lokasi ini pada gilirannya akan memberikan ruang pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat.¹⁰

Mengenai hal tersebut di atas, tentu tidak terlepas dari pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam menetapkan aturan atau rencana dalam merancang strategi untuk mengembangkan pariwisata. Istilah kebijakan dan perencanaan berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan.¹¹ Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹²

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami sesuatu yang tersembunyi dibalik

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108 /DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal, hlm 26.

⁹ M Indra Dewa, Sunarti Puspita, "Analisis Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah (Studi Pada Pulau Santen/Pantai Syariah Banyuwangi) ," Jurnal Administrasi Bisnis 55, no. 1 (2018): hlm 141- 50.

¹⁰ Sudirman Suparmin, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Utara", Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 1, No. 2, 2018. hlm 192-193.

¹¹ I Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, "Pengantar Ilmu Pariwisata", Edisi I (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm 106.

¹² HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 1.

fenomena yang telah nampak dipermukaan. Jary mendefinisikan istilah *Qualitative Research techniques* sebagai setiap penelitian dimana ilmuwan sosial mencurahkan kemampuan sebagai pewancara atau pengamat empatik dalam rangka mengumpulkan data yang unik mengenai permasalahan yang diinvestigasi.¹³ Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan suatu teori secara induktif dari abstraksi-abstraksi data yang dikumpulkan tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus Berbasis Wisata Halal.

2. Latar Penelitian

Latar penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan tempat harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Tempat yang akan diteliti yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sambas di Bidang Pariwisata, Pemerintah Desa Piantus.

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Pengembangan Ekonomi Kawasan Wisata Bukit Piantus Berbasis Wisata Halal

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Pengembangan Ekonomi Kawasan Wisata Bukit Piantus Berbasis Wisata Halal sebagai objek wisata yang menjadi unggulan di Kabupaten Sambas tak terlepas dari sinergi antara pihak masyarakat dan pihak pemerintah. Merujuk pada teori tentang peran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 aspek, yaitu sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator.

a. Pemerintah sebagai Motivator

Peran pemerintah sebagai motivator artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara

¹³ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, hlm. 57-65.

¹⁴ Ansem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 11-13.

dinamika pengembangan pembangunan di suatu wilayah. Partisipasi masyarakat dan pihak Swasta dapat ditingkatkan salah satunya melalui peranan pemerintah Daerah sebagai motivator penggerak partisipasi masyarakat dan pihak Swasta. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas khususnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai salah satu stakeholder pembangunan maupun pengembangan wisata memiliki peran sebagai motivator untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut baik dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, agar diantaranya tercipta suatu hubungan yang mampu bekerjasama demi perkembangan Ekonomi kawasan wisata Bukit Piantus.

1) Sinergitas Pemerintah dengan Masyarakat sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator memiliki pengaruh pada masyarakat, mereka bisa berpikiran lebih terbuka untuk berpikir ekonomis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan Wisata Bukit Piantus seperti mempromosikan Wisata Bukit Piantus ke wisatawan luar sehingga menarik wisatawan berwisata ke Bukit Piantus dan dengan adanya mengembangkan fasilitas di kawasan wisata Bukit Piantus seperti membuka warung kopi, warung makan dan lain sebagainya demi terciptanya hubungan erat antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dari segi ekonomisnya tanpa mengesampingkan kelestarian Bukit Piantus itu sendiri.

Peran pemerintah selaku motivator dalam mensinergikan semua pihak yang terlibat khususnya pihak masyarakat sudah terealisasi walaupun belum maksimal. Hal itu bisa kita lihat dengan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengembangan Ekonomi kawasan wisata Bukit Piantus seperti Pembuatan Spot-spot foto di Bukit Piantus. Itu semua berkat edukasi dan komunikasi yang intens dilakukan pihak pemerintah dengan masyarakat guna kemajuan Wisata Bukit Piantus yang lebih baik lagi. Bentuk motivasi lain pemerintah terhadap masyarakat yaitu kerjasama, dimana pemerintah selalu memotivasi masyarakat agar tetap terlibat dan turut andil dalam pengembangan Ekonomi kawasan wisata Bukit Piantus.

Bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bukit Piantus yaitu bekerjasama dalam mengelola, mengembangkan dan menjaga serta melestarikan kawasan objek wisata Bukit Piantus. Dimana pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam mengembangkan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus, misalnya dalam hal pembinaan dan pengelolaan, dimana pihak pemerintah beserta masyarakat bekerjasama dalam pengembangan dan pengawasan Wisata Bukit Piantus guna meminimalisir kerusakan yang berpotensi terjadi pada kawasan Bukit Piantus.

Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku penguasa yang mengurus berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah tak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan sambutan ketaatan dari rakyat. Berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. Gayung bersambut antara pemerintah dan rakyatnya menjadi satu ketetapan yang harus dipertahankan. Maka dari itu, hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintahnya, dengan saling bekerja sama di atas Islam dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-masing, akan menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, dan sentosa.

2) Sinergitas Pemerintah dengan Pihak Swasta sebagai Motivator

Selain masyarakat, pemerintah juga melibatkan pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus. Pemerintah gencar melakukan

pemasaran ataupun promosi guna menarik perhatian maupun memotivasi pihak swasta agar terlibat dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus. Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta mempromosikan atau memperkenalkan Kawasan Wisata Bukit Piantus ke para wisatawan dan memberi pengetahuan tentang pemasaran kepada Pokdarwis maupun masyarakat di wilayah Desa Piantus, hal itu dikarenakan pihak swasta dalam hal ini ASITA (Asosiasi tour and travel) turut memberikan sumbangsih bagi pengembangan kawasan Ekonomi Kawasan Wisata Bukit Piantus .Peran pemerintah disini bertujuan untuk menjembatani kepentingan Publik dan kepentingan swasta agar berjalan wajar tanpa merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta namun pihak swasta belum mampu memberikan sumbangsih berupa pembangunan atau pengembangan fasilitas di wilayah Bukit Piantus.

b. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan Ekonomi Kawasan Wisata Bukit Piantus berbasis Wisata Halal, Peran Pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program dalam pengembangan kawasan wisata Bukit Piantus yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dengan swasta maupun masyarakat.

1) Pendampingan Pengembangan Keterampilan kepada masyarakat Desa Piantus oleh pihak Dinas Pariwisata

Sebagai fasilitator pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan Ekonomi Kawasan Wisata Bukit Piantus karena tanpa adanya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengembangan Wisata Bukit Piantus, kawasan wisata ini tidak akan berkembang. Fasilitas sangat menunjang untuk perkembangan kawasan wisata guna tercapainya tujuan dari perencanaannya. Pengembangan Sumber Daya Manusia kawasan wisata Wisata Bukit Piantus sangat berperan penting guna tercapainya sinergi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah sehingga nantinya dapat pula meningkatkan kesejahteraan maupun pengembangan ekonomi bagi masyarakat di kawasan wisata Bukit Piantus.

2) Pengadaan Fasilitas di Wisata Bukit Piantus

Dalam Pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus maka di butuhkan fasilitas untuk menunjang pengembangan Wisata Bukit Piantus sesuai perencanaan. Maka dari itu, Peran Pemerintah Daerah untuk pengadaan, penataan, dan perawatan fasilitas yang lebih baik lagi kedepannya sangat dibutuhkan karena dengan adanya pengembangan fasilitas kawasan Wisata Bukit Piantus yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat memiliki wadah tersendiri dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus.

Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terealisasi sebahagian dan bisa dilihat langsung dilapangan seperti adanya Gerbang masuk atau Gapura, mushola, Toilet, dan tangga untuk mendaki ke Bukit Piantus walaupun saat ini pemerintah belum sepenuhnya untuk memaksimalkan pengembangan fasilitas di wisata bukit Piantus. Namun itu membuktikan bahwa peran pemerintah sangat serius dalam mengembangkan kawasan wisata Bukit Piantus sebagai pusat wisata dan Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dapat mengalokasikan anggaran pembangunan disektor pariwisata agar dapat berkembang dan sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat meningkatkan PAD dan mengembangkan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus.

c. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah Daerah selaku dinamisator yang bertanggung jawab penuh atas semua di kawasan Wisata Bukit Piantus dan wajib melibatkan masyarakat dalam pengembangannya. Dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus, kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus harus terjalin dengan baik guna mencapai tujuan awal perencanaannya hal itu bisa kita lihat sebagai berikut:

1) Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Sebagai dinamisator, pemerintah Daerah berperan penting dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus terutama mensinergikan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Sambas sebagai dinamisator sangat penting dalam mensinergikan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus. Sementara dari hasil observasi lapangan peneliti dalam hal kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat disini dapat dilihat dalam proses pembenahan kawasan wisata Bukit Piantus seperti pembuatan spot-spot foto dan kegiatan kerja bakti bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian wisata bukit piantus oleh Pokdarwis bersama Karang Taruna yang turut melibatkan langsung antara Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga Kabupaten Sambas serta masyarakat sekitar kawasan Wisata Bukit Piantus.

2) Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan pihak Swasta

Selain pihak masyarakat, Pemerintah juga harus melibatkan pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus. Hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Muhammad Muhijrah Kanallah, S.E Kepala Bidang Pemasaran Dan Kelembagaan Pariwisata dalam hal mensinergikan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam Pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus maka dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah selaku motivator adanya sinergitas Pemerintah dengan Masyarakat, kemudian adanya sinergitas Pemerintah dengan Pihak Swasta, sedangkan Peran Pemerintah selaku Fasilitator adalah dengan adanya pendampingan pengembangan keterampilan kepada masyarakat Desa Piantus dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan serta koordinasi yang rutin kepada pengelola, pokdarwis, masyarakat dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pengadaan dan pengembangan fasilitas di Wisata Bukit Piantus walaupun belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana karena terhalang oleh regulasi, Peran Pemerintah sebagai dinamisator sinergi bersama masyarakat dan swasta dalam mengembangkan Wisata Bukit Piantus dengan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak sehingga akan terjadi pengembangan Wisata Bukit Piantus dan menentukan bekembangnya Ekonomi kawasan Bukit Piantus.

Faktor Pendukung dalam Pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus yang paling utama yaitu dukungan dari masyarakat seperti turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan di objek wisata sekitar tempat tinggal mereka dan panorama alam yang indah dan masih asli yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Wisata Bukit Piantus Kemudian memiliki potensi Objek Wisata karena selain mempunyai keindahan alam dari Bukit

Piantus, juga mempunyai wisata kuliner seperti manisan rebung dan bakso selain itu kerajinan rotan dan bambu juga menjadi daya tarik Wisata Bukit Piantus. Faktor Penghambat dari pengembangan Ekonomi kawasan Wisata Bukit Piantus adalah keterbatasan anggaran biaya sarana prasarana sehingga menghambat proses dalam pembangunan maupun pengembangan di Wisata Bukit Piantus, sedangkan lahan yang ada di kawasan Wisata Bukit Piantus adalah milik Desa dan ada juga sebagian milik masyarakat sehingga dapat menghambat pengembangan Wisata Bukit Piantus seperti berpindah-pindah nya area parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Januardi Deki, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang”; GOVERNANCE: Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Vol 8, No. 4, (2019).
- Muljadi, andri warman, “*Kepariwisata dan perjalanan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014).
- Manafie, Adi Hendrik, “Wisatawan dan Penerimaan Masyarakat Lokal Nemberala”, (Salatiga: Tesis Master Program Pascasarjana UKSW Salatiga, 2003).
- Muhamad Djakfar, “*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal Indonesia*”, (Malang : UIN Maliki Press, 2017).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Lembar republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ualama Indonesia No. 108 /DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal.
- M Indra Dewa, Sunarti Puspita, "Analisis Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah (Studi Pada Pulau Santen/Pantai Syariah Banyuwangi) ," Jurnal Administrasi Bisnis 55, no. 1 (2018).
- Sudirman Suparmin, “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Utara”, Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 1, No. 2, 2018.
- I Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, “*Pengantar Ilmu Pariwisata*”, Edisi I (Yogyakarta: Andi Offset, 2009).
- HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," dalam *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005.
- Ansem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).